

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peristiwa pemboman kerap terjadi di Indonesia. Aksi pemboman yang menewaskan ratusan jiwa memiliki sejarah panjang dan keadaannya hampir identik dengan aksi pemboman di Pakistan, Palestina, Irak dan Filipina. Aksi Bom Bali 1 dan 2, bom Kedubes Australia, Kedubes Filipina, bom JW Marriot dan Ritz Carlton menunjukkan rentetan panjang aksi pemboman di Indonesia. Sosok pelaku pemboman seperti Amrozi, Ali Ghufron, Imam Samudera, Dr Azahari, Dany, Nana, Saefudin Zuhri dan Noordin M Top menjadi aktor yang tampil menghiasai pemberitaan media massa.

Setiap kali peristiwa pemboman di Indonesia terjadi maka media secara langsung memberikan nama sebagai aksi terorisme. Maka terminologi terorisme dalam pemberitaan media di Indonesia seolah telah menjadi kebijakan wajib yang dianut oleh semua media. Tidak satupun yang berani berbeda dengan menggunakan pilihan kata yang lain. Diksi “aksi anarkhi”, “perbuatan melawan hukum”, “kekerasan” dan kata lain yang semisal, jarang digunakan oleh media. Mereka menganggap bahwa kata terorisme adalah suatu keharusan untuk menyebut aksi-aksi pemboman yang terjadi.

Sepintas lalu penggunaan kata terorisme nampak wajar dan cocok dengan realitas yang terjadi. Namun jika kita cermati lebih dalam akan nampak dengan jelas bagaimana penggunaan kata ini ternyata telah diidentikkan dengan aksi dan

kelompok tertentu. Setidaknya ada dua hal yang harus terjadi bersamaan yaitu peristiwa dan pelakunya. Apabila peristiwa pemboman atau kekerasan lainnya dilakukan oleh kelompok yang dimaksud media, maka kata terorisme bisa digunakan. Sebaliknya jika tidak maka pilihan kata yang digunakan bukan terorisme.

Sebagai contoh sumber pendanaan peristiwa Bom Bali 2, disinyalir berasal dari perampokan toko emas di daerah Pekalongan. Maka jadilah peristiwa perampokan tersebut disebut sebagai kegiatan terorisme. Sementara aksi perampokan toko emas lainnya biasa disebut sebagai “aksi perampokan” atau “kejahatan” semata. Sebuah peristiwa yang sama diberi nama berbeda oleh media. Aksi perampok di Somalia membajak perahu yang lewat di daerah mereka, tidak pernah disebut oleh media dengan sebutan teroris. Media memberikan label perampok atau bajak laut semata. Nampak jelas bahwa kebijakan media dalam pemberitaan terorisme bukanlah sesuatu yang netral atau apa adanya, melainkan sebuah kebijakan yang syarat muatan ideologis. Label teroris diberikan kepada kelompok tertentu (dalam hal ini Islam) yang memiliki ciri-ciri khusus.

Wacana terorisme yang digulirkan oleh media menggelinding bak bola salju dan memberikan dampak signifikan di masyarakat. Fenomena terorisme di Tanah Air seperti tidak terlepas dari bias yang diciptakan Barat, terutama Amerika Serikat. Pasca tragedi WTC Amerika Serikat menerapkan kebijakan yang keras terhadap negara-negara muslim. Stigma yang buruk tentang Islam sebagai teroris oleh Presiden AS ketika itu, Goerge W Bush membuat umat Islam di negara itu termarginalkan, didiskriminasikan, bahkan diperlakukan tidak manusiawi. Sampai

hari ini mereka masih menerapkan kecurigaan yang buruk tentang muslim. Muslim pantas dicurigai sebagai teroris, orang yang paling berbahaya. Di Indonesia bias ini terus terjadi dalam pemberitaan tentang terorisme. Masjid begitu gampang dikutip sebagai tempat bagi Saefudin Jaelani merekrut para pelaku bom bunuh diri. Jadilah masjid sebagai "sarang teroris".

Stigma teroris sudah melekat pada atribut-atribut tertentu yang berhubungan dengan sebuah agama. Hal tersebut juga menjadikan keluarga dan turunan mereka mempunyai *stigma* yang sama di tengah masyarakat. Konsekuensi dari *stigma* tersebut ternyata berantai. Keluarga yang salah satu anggotanya menjadi teroris mendapatkan perlakuan tidak semestinya di masyarakat. Anak-anak menjadi malu, takut dan dikucilkan dari pergaulan¹. Tidak sedikit yang terpaksa menutup diri dari pergaulan karena takut dengan *stigma* tersebut. Lebih parah lagi ketika jenazah beberapa pelaku teror kemudian ditolak untuk dikuburkan di suatu daerah karena masyarakat takut daerah mereka disebut sarang teroris². Terorisme telah menjadi bahan perbincangan hampir semua orang, dari pejabat tinggi sampai tukang becak, perbincangan tentang terorisme untuk sementara waktu menggeser dan melupakan problem hidup keseharian kita dan apa yang bangsa ini sedang hadapi. Semua orang yang masih memiliki nurani sepakat bahwa terorisme tidak dibenarkan oleh agama manapun.

¹ Anak para pelaku teror mendapatkan diskriminasi dari masyarakat di sekitarnya baik dalam pergaulan maupun sekolah. Mereka juga harus menyanggah stigma "keluarga teroris". Baca selengkapnya di "*Anak-anak Teroris Tak Bersalah, Jangan Ada Labelisasi*" (detik.com/13/8/09)

² Jenazah teroris Husamudin ditolak untuk di makamkan di daerah Cilacap dan Purbalingga oleh masyarakat setempat. Karena penolakan tersebut pihak keluarga sempat berencana untuk memakamkan di halaman rumah. Baca selengkapnya di berita "*Ditolak Warga, Keluarga Siap Makamkan Teroris Di Halaman Rumah*" (suaramerdeka.com/28/9/09)

Proses *stigmatisasi* ternyata melibatkan media massa di dalamnya. Melalui berita atau liputan langsung, media melekatkan kata teroris atau sejenisnya untuk memberi label pada peristiwa atau orang tertentu. Bisa jadi media hanya sebagai saluran yang meneguhkan *stigma* tersebut karena mereka mengutip pernyataan resmi dari pemerintah maupun kepolisian. Di sisi lain media juga bisa secara sadar memberikan label tersebut. Oleh karena itu menarik untuk dikaji proses *stigmatisasi* berita teroris di media massa.

B. Rumusan Masalah

Wacana terorisme yang dikembangkan media mengarah pada stigmatisasi pemberitaan. Pertanyaan penelitian yang dapat diajukan adalah: Gagasan-gagasan apa yang disajikan oleh media massa dalam pemberitaan terorisme? Mengapa pemberitaan media massa memiliki kecenderungan untuk memberikan stigma dalam pemberitaan terorisme? Jenis-jenis stigmatisasi apa yang dikembangkan oleh media? Bagaimana relasi antara wacana terorisme yang dikembangkan media dengan wacana terorisme yang terdapat di masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan gagasan yang disajikan oleh Kompas dalam pemberitaan terorisme
2. Untuk mengetahui mengapa pemberitaan Kompas memiliki kecenderungan untuk memberikan stigma dalam pemberitaan terorisme
3. Mendeskripsikan jenis-jenis stigmatisasi yang dikembangkan oleh Kompas
4. Untuk mengetahui relasi antara wacana terorisme yang dikembangkan

Kompas dengan wacana terorisme yang terdapat di masyarakat

D. Signifikansi Penelitian

1. Signifikansi Teoritis

Penelitian ini menengahkan wacana terorisme di media massa yang memberikan stigmatisasi terhadap para pelaku teror dan keluarganya yang kemudian berkembang menjadi wacana publik yang terus bergulir. Penelitian tentang kajian analisis wacana stigmatisasi pemberitaan terorisme menggabungkan tiga dimensi wacana ke dalam satu kesatuan analisis, yaitu teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Penelitian ini secara teoritis juga menengahkan analisis kritis Van Dijk untuk analisis pada level teks, dengan berupaya menawarkan perspektif baru yang ditujukan pada teks yang terkandung pemberitaan terorisme. Diharapkan penelitian ini memberikan perspektif dan penjelasan yang lebih komprehensif.

Penelitian sebelumnya dengan menggunakan analisis wacana tercatat atas nama Triyono Lukmantoro dengan judul "Politik Representasi Jurnalisme Populer (Analisis Wacana Model Pemberitaan Tabloidisasi dalam Harian Meteor tahun 2006) FISIP Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Analisis wacana berjudul "Rasialisme Dalam Masyarakat Amerika, Analisis Film Crash" tercatat atas nama Ayu Amalia Khafidz Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia tahun 2008.

2. Signifikansi Sosial

Memberikan *awareness* (kesadaran) kepada masyarakat bahwa stigmatisasi yang direpresentasikan dalam pemberitaan terorisme, membatasi aktualisasi diri dari keluarga para pelaku teror dan dibalik itu mengarah pada diskriminasi yang dirasakan oleh mereka. Stigmatisasi pemberitaan terorisme di media massa juga menimbulkan keresahan dan perlakuan yang melanggar hak asasi manusia (HAM) bagi mereka yang diidentikan dengan ciri-ciri teroris yang dilekatkan media.

3. Signifikansi Praktis

Berupaya memberikan sumbang saran kepada media massa di Indonesia, agar dalam proses pemberitaan terorisme menghindari upaya stigmatisasi yang berdampak pada diskriminasi keluarga para pelaku teror dan orang-orang yang memiliki ciri-ciri identik hampir sama dengan para pelaku teror tersebut.

E. Kerangka Teori

Media sesungguhnya berada di tengah realitas sosial yang sarat dengan berbagai kepentingan, konflik, dan fakta yang kompleks dan beragam. Isi media tidak hadir begitu saja melainkan melalui mekanisme tarik menarik kepentingan internal dan eksternal yang kuat. Apa yang tersaji di media bukanlah realita yang sesungguhnya melainkan formulasi kerja redaksional yang menghadirkan kembali realitas dalam wajah yang lain. Media melalui formulasi tersebut menghadirkan realitas baru yang telah mengalami penambahan, pengurangan, perbaikan, penghapusan atau bahkan distorsi dari realitas sesungguhnya. Alih-alih

menghadirkan realitas obyektif, isi media justru sarat dengan berbagai kepentingan yang melingkupinya.

Beragam kepentingan tersebut yang kemudian membentuk bagaimana realitas dihadirkan dalam konten media. Kepentingan ideologis, ekonomi, politik, sosial, budaya dan kontestasi kepentingan lainnya akan sangat menentukan bagaimana corak dan warna isi media. Sebuah fakta yang sama bisa dimaknai dan dihadirkan berbeda kepada audiens sesuai dengan tarik ulur yang melingkupinya. Di sini nampak bahwa media merupakan agen pendefinisi realitas yang secara aktif menentukan definisi terhadap suatu realitas tertentu. Siapa yang disebut jahat, baik, curang, diberi label positif dan negatif merupakan hasil formulasi redaksional yang dipengaruhi beragam kepentingan. Selain aspek ekonomi dan politik yang mempengaruhi isi media, aspek ideologis juga memegang peran penting dalam pendefinisian realitas.

Penelitian media massa lebih diletakkan dalam kesadaran bahwa teks atau wacana dalam media massa mempunyai pengaruh yang sedemikian rupa pada manusia. Seluruh aktivitas dan pemaknaan simbolik dapat dilakukan dalam teks media massa. Pada dasarnya teks media massa bukan realitas yang bebas nilai. Pada titik kesadaran pokok manusia, teks selalu memuat kepentingan. Teks pada prinsipnya telah diambil sebagai realitas yang memihak, dimanfaatkan untuk memenangkan pertarungan idea, kepentingan atau ideologi kelas tertentu. Media bukanlah mekanisme sederhana yang sekedar menyampaikan informasi namun sekaligus sebagai organisasi yang memegang peran penting dalam masyarakat. Teks media sendiri sudah bersifat ideologis, dan berpotensi untuk menyalurkan

ideologi dominan sekaligus mengekspresikan berbagai potensi perbedaan yang ada. Media menjadi bagian dari industri budaya yang menciptakan simbol dan citra yang dapat menekan kelompok marginal³.

Pembahasan yang harus disadari bukan hanya terletak pada kenyataan bahwa teks media selalu bersifat ideologis. Pembahasan tentang kemampuan untuk membedakan antara kuasa teks itu sendiri dengan pengaruh kuasa struktur makro yang secara sengaja atau tidak sengaja merekonstruksi, merepresentasikan dan memaknai teks tersebut juga menjadi topik menarik. Gans dan Gitlin mengkategorikan beberapa perspektif teoritis yang digunakan untuk melihat isi media. Pertama adalah isi media merefleksikan realitas tanpa distorsi atau hanya ada sedikit distorsi dari realitas. Kedua isi media dipengaruhi oleh sosialisasi dan sikap dari pekerja media. Ketiga, isi media dipengaruhi rutinitas kerjanya, keempat isi dipengaruhi kekuatan institusi lain di luar media, dan kelima isi media dipengaruhi oleh posisi ideologi dan mempertahankan *status quo*⁴. Meskipun konsumen dan produsen teks media mempunyai opsi bagaimana teks harus disimbolisasikan dan dimaknai namun tetap saja ada bingkai yang dipengaruhi oleh faktor yang berada di luar jangkauan kendali sadar konsumen atau produsen teks media.

³ Sebagai saluran yang tidak bebas nilai media menjadi ajang pertarungan ideologi sekaligus secara aktif mendefinisikan beragam persoalan dalam kerangka kerjanya. Littlejohn, S. W. 2008. *Theories of Human Communication 9th Edition*, Belmont CA:Wadsworth N/A Hal : 305

⁴ Pamela Shoemaker dan Stephen D. Reese, *Mediating the Message: Theories of Influences on Mass Media: 2nd edition* (New York: Longman, 1996).hal 6-7

Pandangan kritis akan memberikan gambaran jelas bagaimana kepentingan yang bermain dalam proses produksi konten media. Menurut Mc Quail ada lima cabang utama teori kritis tentang media yaitu Marxisme Klasik, Ekonomi Politik, Frankfurt School, Teori Hegemoni, dan *Cultural Studies*. Marxisme Klasik melihat media sebagai alat dari kelas dominan dan sarana yang digunakan untuk mempromosikan kepentingan kelompok kapitalis. Media menyalurkan ideologi dari kelas berkuasa yang memungkinkan untuk menekan kelompok-kelompok tertentu. Hal ini berkaitan dengan cara bagaimana sebuah realitas atau teks ditafsirkan dan dimaknai dengan cara pandang tertentu.

Teori Ekonomi Politik Media menyalahkan kepemilikan media sebagai penyebab sakitnya masyarakat. Isi media merupakan komoditas yang diperjualbelikan di pasar dan informasi yang disampaikan dikontrol oleh kepentingan pasar. Frankfurt School melihat media sebagai sarana untuk mengkonstruksi budaya, memberikan penekanan pada ide daripada barang materi. Dalam pandangan mereka, media dilihat sebagai alat untuk mengunggulkan ideologi kelompok elit. Media melakukan manipulasi simbol dan citra untuk keuntungan kepentingan tertentu dari kelompok dominan. Teori hegemoni melihat bagaimana dominasi dari kepalsuan ideologi terhadap kondisi yang sesungguhnya. Ideologi tidak disebabkan oleh sistem ekonomi semata tetapi secara mendalam membonceng pada setiap aktifitas masyarakat⁵.

⁵ Littlejohn, S. W. 2008. *Theories of Human Communication 9th Edition*, Belmont CA:Wadsworth N/A Hal: 305-306. Lihat tulisan Masnur Muslich, Kekuasaan Media Massa Mengonstruksi Realitas, dimuat dalam jurnal *BAHASA DAN SENI, Tahun 36, Nomor 2, Agustus 2008*.

Studi media dalam perspektif kritis menghasilkan beragam pertanyaan yang berusaha mengungkap secara kritis isi media. Beragam pertanyaan kritis bisa diajukan diantaranya, bagaimana ideologi media bisa diterima oleh khalayak? bagaimana ideologi mampu menghadirkan kesadaran bagi pengikutnya? bagaimana media menghadirkan kontestasi kelompok kuat dan marjinal dalam kerangka pemberitaan? Bagaimana ideologi jurnalis berbenturan dengan ideologi pemilik dan kepentingan ekonomi lainnya? Mekanisme apa yang dilakukan media untuk menampilkan ideologi dominan? siapa yang diuntungkan dalam pemberitaan dan siapa yang dirugikan?⁶.

Ideologi dalam penjelasan Karl Marx disebut sebagai suatu ajaran yang menjelaskan suatu keadaan, terutama struktur kekuasaan secara khusus sehingga orang menganggapnya sesuatu tersebut sah. Pada kenyataannya sesuatu yang dijelaskan tersebut jelas tidak sah. Ideologi melayani kepentingan kelas berkuasa karena memberikan legitimasi kepada suatu keadaan yang sebenarnya tidak memiliki legitimasi atau pengesahan. Ideologi dalam paradigma Marxian dipahami sebagai kesadaran palsu (*false consciousness*) yang berisi sejumlah gagasan yang mendistorsikan realitas sesungguhnya untuk menjaga kepentingan dari kelas yang berkuasa (*the ruling class*). Ideologi merupakan pemalsuan serta distorsi dari realitas sosial yang sesungguhnya terjadi dalam masyarakat, sehingga

⁶ Hal ini bertentangan dengan studi media dalam kerangka objektifis yang mengandaikan adanya obyektifitas, netralitas dan imparialitas yang bisa dilakukan oleh media dalam pemberitaan. Meyakini bahwa media adalah saluran yang bebas nilai merupakan simplifikasi dari pandangan ini.

kelas subordinat dapat dibohongi⁷.

Definisi ideologi sebagai kesadaran palsu tidak mencukupi untuk mewakili gagasan Marx karena kesadaran palsu tidak secara spesifik dapat menunjukkan jenis distorsi apa yang hendak dikritik. Kelas yang berkuasa memiliki kekuatan material dalam masyarakat yang dengan sendirinya menentukan kekuatan intelektualnya. Mereka yang memiliki perangkat-perangkat produksi mental dan intelektual secara otomatis mampu menentukan dan mengarahkan gagasan-gagasan yang muncul dalam masyarakat.

Kelas sosial yang tidak memiliki perangkat-perangkat produksi mental akan menyerah dan tunduk terhadap gagasan-gagasan yang diproduksi oleh kelas yang berkuasa. Sebagai contoh, seorang yang memiliki pendidikan tinggi, mampu melahirkan ide dan gagasan untuk kemajuan wilayahnya. Penduduk yang tinggal di daerah tersebut akan serta merta mengikuti gagasan tersebut karena mereka tidak memiliki perangkat intelektual untuk melawan gagasan tersebut⁸.

Ideologi termasuk salah satu bagian dari superstruktur yang kedudukannya sangat sekunder dan dianggap sepenuhnya didikte oleh basis (perekonomian) yang menjalankan peran primer. Marx menekankan pentingnya filsafat materialisme yang menegaskan bahwa keadaan sosial yang menentukan

⁷ Littlejohn, S. W. 2008. *Theories of Human Communication 9th Edition*, Belmont CA:Wadsworth N/A, hal:330-331. Lihat Franz Magnis-Suseno, *Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme* (Jakarta: Gramedia, 2001), hal. 122.

⁸ Pemikiran Marx dianggap terlalu ekonomistik ketika melihat cara memproduksi (*mode of production*) dalam sistem perekonomian yang diterapkan masyarakat sebagai faktor utama dalam menentukan segala hal. Determinisme ekonomi dalam pandangan Marx akan menentukan proses kehidupan sosial, politik, intelektualitas, budaya dan segala aktifitas masyarakat. Karakteristik gagasan Marx menekankan aspek ekonomi sebagai dasar atau basis (*base*) yang menentukan bangunan atas (*superstructure*) Lihat Karl Marx, "Base and Superstructure", dalam Storey (ed.), hal. 198. Pendapat Marx tidak sepenuhnya benar karena dalam sejarah masyarakat modern nampak bahwa yang menjadi basis adalah masyarakat dan budaya menjadi superstruktur (lihat Mc Quail, "Mass Communications Theory", 2000;61)

kesadaran seseorang, dan bukan sebaliknya. Kondisi sosial seseorang dalam masyarakat menentukan peran dan kemampuannya dalam bertindak. Untuk menjawab perangkat-perangkat intelektual apa yang mampu digunakan sebagai instrumen untuk menyebarkan ideologi, bisa digunakan konsep hegemoni. Konsep ini merupakan jawaban dari pernyataan Marx tentang ideologi yang belum menjawab persoalan perangkat intelektual apa yang digunakan untuk menyebarkan ideologi. Antonio Gramsci mengemukakan bahwa hegemoni dimengerti sebagai penguasaan satu kelas terhadap kelas lain dalam masyarakat tanpa melalui cara-cara kekerasan. Kelas yang dikuasai seolah-olah mengikuti begitu saja apa yang dikehendaki oleh kelas yang berkuasa. Dalam batas-batas tertentu kelas subordinat ini mengikuti keinginan dari gagasan yang dikemukakan oleh kelas dominan. Hegemoni bukanlah dilakukan dengan mengandalkan penindasan fisik, melainkan melalui mekanisme kesepakatan atau konsensus. Jadi, hegemoni biasanya dipertentangkan dengan dominasi yang lebih mengandalkan mekanisme yang bersifat represif atau penekanan fisik⁹.

Hegemoni Gramsci, memiliki tiga model, yaitu: kepemimpinan kultural dan intelektual yang dijalankan dalam masyarakat sipil (*civil society*). Sementara itu negara (*state*) merupakan tempat bagi kekuasaan koersif yang bentuknya berupa polisi dan angkatan bersenjata. Sedangkan ekonomi merupakan situs bagi pendisiplinan kerja serta kontrol moneter. Kedua, hegemoni dilangsungkan di wilayah negara sebagaimana yang terjadi dalam masyarakat sipil. Gramsci

⁹Dalam hegemoni kemampuan intelektual individu memegang peran penting dalam mempengaruhi orang lain. Mekanisme kesepakatan atau konsensus dalam hegemoni merupakan hasil penguasaan intelektual seseorang terhadap suatu persoalan, bagaimana seharusnya disikapi. Lihat "Imaji Media Massa", karya Burhan Bungin, 2001:2007

melihat pentingnya lembaga-lembaga pendidikan dan hukum sebagai kekuatan untuk melakukan hegemoni. Ketiga, hegemoni terjadi dalam “masyarakat politik” dan “masyarakat sipil” yang didefinisikan Gramsci sebagai negara itu sendiri. Terlihat di sini perbedaan antara negara dan masyarakat sipil telah menghilang atau digugurkan oleh Gramsci sendiri. Cara menanamkan ideologi dengan kekerasan disebut sebagai dominasi, sedangkan cara persuasi disebut hegemoni.¹⁰

Perspektif hegemoni ketiga dari Gramsci itulah yang kemudian dikembangkan oleh Louis Althusser ketika mendefinisikan ideologi sebagai kekuatan interpelasi. Menurut Althusser negara memiliki kekuasaan yang sedemikian dominan karena ditopang oleh dua jenis aparatus sekaligus, yaitu Aparatus Negara Represif (*Repressive State Apparatuses*, RSA) serta Aparatus Negara Ideologis (*Ideological State Apparatuses*, ISA). Mekanisme kerja yang dilakukan oleh RSA maupun ISA bersifat saling berjalanan, yakni ISA menyediakan basis pembenaran atau legitimasi bagi RSA untuk melakukan kekerasan fisik. Memang, pada dasarnya, RSA berfungsi dengan cara represif sementara ISA berfungsi secara ideologis. Kekompakan kerja antara RSA dan ISA inilah yang menjadikan individu-individu seakan-akan takluk begitu saja di hadapan kekuasaan negara. Althusser mendefinisikan ideologi dalam dua tesis utama, yaitu: Pertama, ideologi merepresentasikan secara imajiner hubungan antara individu-individu dengan kondisi eksistensinya yang real. Kedua, ideologi

¹⁰Van Zoonen, Lisbet, “Feminiist Media Studies”, pada chapter “New Themes”, Lihat Robert Bocoock, *Hegemony* (London and New York: Tavistock Publications, 1986), hal. 28-29. Lihat artikel “Ideology and discourse analysis”, TEUN A. VAN DIJK, dimuat di *Journal of Political Ideologies* (June 2006), 11(2)

bukanlah semata-mata gagasan, namun juga memiliki keberadaannya secara material. Akhirnya, ideologi menempatkan individu sebagai subyek tertentu dalam masyarakat.

Cara bekerja dari ideologi ini adalah dengan melakukan interpelasi (pemanggilan) di mana individu yang merasa namanya disebut atau dipanggil secara otomatis akan menoleh ke arah kekuatan (negara) yang memanggil tadi. Kritik Althusser yang lain tentang Marx adalah hubungan antara 'base' dan 'superstructure' yang dalam teori Marx lebih bersifat otonomi relatif. 'Base' menurut pandangan Marxisme tradisional adalah struktur ekonomi yang menentukan semua aktifitas 'superstructure' di atasnya, seperti struktur-struktur ideologi, politis, sosial, kebudayaan, dan sebagainya. Menurut Althusser, kedudukan 'base' dan 'superstructure' adalah otonomi relatif. Basis dan struktur ekonomi tidak selalu menjadi penentu segala aktifitas 'superstructure' di atasnya. Hal tersebut terjadi karena masing-masing tingkatan mempunyai problematika sendiri-sendiri. Marxis Althusserian memandang praktek ideologi dalam media massa relatif otonom dari determinasi ekonomi. Menurut Althusser ideologi berbasis material. Dalam masyarakat kapitalis kontemporer, ideologi selalu berjalan melalui apa yang disebut sebagai "*ideological state apparatuses (ISA)*". Mereka yang menanamkan ideologi tersebut bisa berasal dari negara, tokoh agama, partai politik, keluarga, hukum, sistem partai politik, serikat dagang, komunikasi dan budaya.¹¹

¹¹Althusser merupakan salah satu tokoh yang menolak esensi Marx, yaitu tentang 'economism' dan 'humanism'. Althusser mengatakan bahwa ideologi merupakan representasi dari hubungan imajiner antara individu dengan kondisi eksistensi nyatanya. Kedua mengatakan bahwa representasi gagasan yang membentuk ideologi tersebut tidak hanya mempunyai eksistensi

Dengan menggabungkan gagasan Gramsci dan Althusser maka media massa serta kalangan jurnalis yang bekerja di dalamnya termasuk dalam lingkup masyarakat sipil dan ISA. Ini disebabkan media massa tidaklah berfungsi dengan cara-cara penindasan secara fisik, melainkan dengan menyebarkan gagasan-gagasan dominan yang diproduksi oleh kelas yang dominan yang sedang menguasai negara. Persoalannya adalah media massa yang sekarang ini ada kebanyakan dimiliki oleh pihak swasta. Ini berarti negara sangat sedikit memiliki peluang untuk melakukan campur tangan terhadap aktivitas yang dilakukan oleh media massa, baik dari segi permodalan maupun perizinan. Meski demikian peran ganda yang dimiliki oleh para pemilik media yang juga terlibat dalam mengatur tata pemerintahan memberikan peluang campur tangan negara dalam pengelolaan media massa. Beberapa pemilik media massa memegang jabatan perdana menteri, menteri, ketua partai politik dan anggota perwakilan rakyat. Posisi dari pemilik tersebut berpotensi untuk melibatkan negara dalam pengelolaan media sehingga ideologi dominan bisa dilanggengkan.

Uraian tentang ideologi tersebut membantu untuk menjelaskan bagaimana posisi media ketika menggambarkan realitas yang dihadapi kelompok subordinat atau mereka yang dianggap menyimpang dari ideologi kelompok berkuasa. Penggambaran media mengenai kelompok minoritas tak jarang dilakukan secara stereotipikal atau merendahkan. Stereotip terhadap kelompok minoritas terjadi baik di media cetak, elektronik, film, buku-buku pelajaran, ataupun media

spriritual, tetapi juga material. Eksistensi material menurut Althusser dapat dikatakan merupakan kepercayaan seseorang atau ideologi seseorang terhadap hal tertentu yang akan diturunkan dalam bentuk-bentuk material yang secara alami akan diikuti oleh orang tersebut. Louis Althusser, "Ideology and Ideological State Apparatuses", dalam Storey (ed.), *op. cit.*, hal. 151-162.

lainnya. Penelitian mengenai stereotip mengindikasikan bahwa media dapat mengutamakan stereotip, dan stereotip inilah yang kemudian berpengaruh terhadap pemahaman seseorang. Berbagai stereotip tersebut mempengaruhi bagaimana seseorang membuat penilaian terhadap orang dari kelompok yang dikenai stereotip¹².

Lippman mengutarakan bahwa stereotip adalah "gambaran dalam kepala kita" yang memiliki komponen afektif dan kognitif. Gambaran tersebut sebagai faktor penentu penghormatan terhadap diri sendiri, gambaran dari dunia kita, sistem nilai, posisi, dan hak-hak kita. Oleh karena itu stereotip berkaitan erat dengan perasaan seseorang yang melekat pada stereotip tersebut. Stereotip merupakan representasi kognitif atas kelompok lain yang mempengaruhi perasaan seseorang terhadap anggota dalam kelompok tersebut¹³.

Stereotip memiliki dua kecenderungan, yaitu positif dan negatif. Media turut berperan dalam mendorong terbentuknya rasisme simbolik karena pemberitaan yang berlebihan. Prasangka pada akhirnya dapat menuntun terjadinya diskriminasi karena terbentuk berdasar hal yang tidak akurat dan dipertanyakan keabsahannya. Prasangka bisa menuntun pada terbentuknya *extrovert behaviour* yang berkonotasi dan berakibat negatif. Prasangka mencakup sikap, keyakinan, atau predisposisi untuk bertindak. Diskriminasi dapat dipahami sebagai variasi

¹² Bryan, Jennings & Zillmann, Dolf (ed.) (2002). *Media Effects: Advances in Theory and Research (2nd edition)*. New Jersey: Lawrence, Erlbaum Associates Inc. hal: 102–103

¹³ Gudykunst, William B. & Yun-Kim, Young. (1997). *Communicating with Strangers: An Approach to Intercultural Communication*. 3rd edition. Boston: McGraw Hill. hal: 112

atau beragam kategori ancaman yang tidak seimbang terhadap pihak lain¹⁴.

Konsep lain yang bisa menjadi pembanding dari konsep stereotip adalah gagasan tentang stigma. Hal yang membedakan stigma dan stereotip terletak pada kecenderungan yang timbul dimana stigma selalu memiliki konotasi negatif sedangkan stereotip bisa berkonotasi positif. Stigma berasal dari bahasa Yunani yang merujuk pada tanda yang dibuat oleh alat tertentu atau merek tertentu. Stigma pada jaman dahulu dimaksudkan sebagai tanda dalam bentuk potongan atau pembakaran terhadap tubuh yang mengindikasikan status seseorang yang didiskreditkan¹⁵.

Stigma biasanya diberikan kepada orang-orang seperti buruh, pelaku kriminal atau mereka yang menyimpang dari norma utama. Pemberian stigma terhadap tubuh dimaksudkan untuk membedakan jenis status antara orang yang dianggap normal dan didiskreditkan. Stigma terhadap orang-orang yang mengidap keterbelakangan mental telah terjadi semenjak dahulu. Studi tentang hal tersebut sudah dimulai sejak awal tahun 1900 an. Radikalisme, reformasi dan pergerakan masyarakat sipil menjadi contoh bagaimana stigma bekerja dalam ranah politik. Satu kelompok menamakan dirinya sebagai kelompok reformis dan yang lain di cap sebagai *status quo*. Dalam stigma terkandung karakteristik yang dilekatkan terhadap kelompok yang dianggap menyimpang. Kelompok reformis memiliki ciri-ciri tertentu demikian halnya kelompok status quo.

¹⁴Liliweri, Alo. (2005). *Prasangka & Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*. Yogyakarta: LKiS. Hal: 204, lihat tulisan Van Dijk, *Media, Racism, and Monitoring*, versi pdf dapat diunduh di <http://www.mediadiscourses.org/>

¹⁵ The Oxford English Dictionary, 1933

Stigma, diskriminasi dan hak asasi manusia memiliki hubungan yang dekat. Stigma digambarkan sebagai proses devaluasi dinamis yang secara signifikan mendiskreditkan seseorang di mata orang lain. Warna kulit, cara bicara, kebiasaan dan tingkah laku seseorang bisa menjadi dasar pemberian stigma. Sebagai contoh, orang Afrika berkulit hitam ketika melakukan kejahatan, maka ia akan diberi julukan “penjahat kulit hitam”, orang Madura sering disebut “tukang rongsok”. Bruce Link dan Jo Phelan¹⁶ menyatakan bahwa stigma dapat eksis jika ada empat komponen yang terpenuhi yaitu: perbedaan individu dan variasi label manusia, kepercayaan kultural yang menjadi atribut kelompok, label individual dan kelompok membuat munculnya hubungan antara “kita” dan “mereka”, label yang diberikan terhadap individu menimbulkan adanya diskriminasi. Dalam situasi ini stigma bisa terjadi jika labeling, stereotip, pengucilan, kehilangan status dan diskriminasi, eksis secara bersamaan dalam relasi kuasa.

Teori tentang stigma salah satunya diungkapkan oleh Erving Goffman. Dalam bukunya *Presentation of Self in Everyday Life* (1959) ia mengemukakan beberapa konsep yang menarik diantaranya adalah *self*, *stigma* dan *frame*. Stigma adalah jarak yang terjadi antara identitas sosial virtual dengan identitas sosial aktual. Orang yang mengalaminya disebut *terstigmatisasi*. Stigma dan stigmatisasi adalah tanda yang terlihat untuk menunjukkan *insider* dan *outsider* serta memunculkan ketidakberdayaan dan ketidakadilan sosial¹⁷. Ketika setiap individu

¹⁶ Bruce G. Link and Jo C. Phelan, "Conceptualizing Stigma", *Annual Review of Sociology*, 2001, p.363 Penulis memperoleh versi pdf dari resume buku “*Presentation of Self in Everyday Life*” karya Erving Goffman, 1959, Doubleday Anchor Books Doubleday & Company., inc. Carden city, New York .

¹⁷ Baca Artikel tentang pemikiran, Goffman berjudul “*Stigma. Notes on the management of spoiled identity*”, Penguin, London 1968, Baca pula Davies T.W., Morris A., *A comparative*

memiliki sifat yang dapat menghancurkan secara permanen identitas dan menghalangi partisipasi penuh mereka dalam masyarakat, hal tersebut melahirkan stigma.

Stigma adalah atribut yang mengganggu identitas individu. Goffman membedakan stigma menjadi tiga jenis yaitu¹⁸:

1. Abominations of the body (ketimpangan fisik)

Orang-orang yang cacat tubuhnya diberikan julukan khusus seperti si Pincang, buntung dan bisu.

2. Blemishes of individual character

Orang-orang yang mempunyai karakter individual tercela. Misalnya: homoseksualitas, bunuh diri, ketagihan dan pecandu. Ketimpangan karakter, seperti gangguan mental

3. Tribal stigmas

Stigma kesukuan (Tribal) : ras, agama, dan bangsa ekstremis agama atau politik. Stigma ini bisa muncul dalam bentuk keturunan. Contoh: keturunan Ahmadiyah, anak teroris, dan keturunan China. Bisa juga disebut PKI karena punya orientasi politik komunis.

Keanggotaan dalam bersosialisasi menurunkan nilai seperti rasisme dan minoritas etnis atau gender. Karena stigma selalu membawa pertimbangan yang negatif, individu menggunakan strategi untuk melindungi dirinya dari situasi yang

quantification of stigma Social Work and Social Science Review,1(2) 1989-90,109-122. Penulis mendapatkan kedua artikel tersebut dalam format pdf.

¹⁸ Tony, et al, *International Encyclopedia of Social Policy* London: Routledge, forthcoming 2003 Editors: Fitzpatrick, diambil dari artikel Justin J.W. Powell, Max Planck Institute for Human Development, Berlin powell@mpib-berlin.mpg.de / justinjwpowell@aol.com

“normal”¹⁹. Setiap individu mungkin berupaya menyembunyikan stigma mereka jika itu bisa disamarkan, dan membatasi dampak sosial dari stigma tersebut pada satu identitas yang mereka miliki. Stigma yang lain, seperti kecacatan-kecacatan fisik dapat dilihat sebagai status utama individu.

Erving Goffman menyebutkan dua tipe orang yang terstigmatisasi yaitu *the discredited and discreditable*. The discredited adalah orang yang nampak berbeda dengan tataran ideal orang pada umumnya. Sebagai contoh idealnya seseorang tidak memiliki penyimpangan seksual baik gay atau lesbian. Ketika seseorang diketahui penyimpangannya oleh orang lain maka ia disebut *discredited*. Sedangkan *the discreditable* adalah orang yang berbeda atau menyimpang dari norma ideal namun perbedaan atau penyimpangannya belum diketahui orang lain. Ketika penyimpangannya diketahui oleh orang lain maka ia akan ditolak dari pergaulan²⁰.

Stigma dikonstruksi dan dikekalkan dalam bahasa. Ketika stigma dilekatkan maka diskriminasi akan terjadi. Discrimination sebagaimana didefinisikan oleh UNAIDS dalam *Protocol for Identification of Discrimination against People Living with HIV (2001)*²¹, bisa merujuk pada beberapa hal diantaranya perbedaan arbiter, eksklusifitas, halangan untuk menyayangi

¹⁹ Ketika individu dianggap menyimpang dari norma dan perilaku di sekitarnya maka mereka cenderung menyembunyikan keanehan tersebut. Sebagai contoh pelaku homoseksual dan lesbian tidak secara terang-terangan mengakui kondisi mereka pada masyarakat yang tidak bisa menerima.

Celebrating Erving Goffman, 1983, http://itsa.ucsf.edu/~eliotf/Celebrating_Erving_Goffman.htm

²⁰ Silahkan dilihat “Parsons’ sick role” karya Kath Maguire, versi pdf bisa dilihat di www.medgraphics.cam.ac.uk/shield/

²¹ Baca artikel, Kate Wood, dan Peter Aggleton, , “*Stigma, Discriminations and Human Rights*”, tulisan lengkap bisa diakses di <http://www.socstats.soton.ac.uk/cshr/SafePassages.htm>

seseorang, biasanya dilakukan dengan memberikan karakteristik tertentu yang dianggap berbeda dari kelompok utama. Dalam hal ini stigma dan diskriminasi saling berhubungan, menguatkan dan melegitimasi satu sama lain. Stigma adalah akar dari diskriminasi yang membuat orang bertindak terhadap orang lain yang dianggap berbeda. Keduanya saling menguatkan karena stigma berada dalam pikiran, hati dan perkataan sedangkan diskriminasi adalah tindakan nyata terhadap orang yang terstigmatisasi.

Dalam pemberitaan tentang terorisme misalnya, bisa dilihat varian *tribal stigmas* yang juga dialami oleh anak-anak mereka. Daerah atau institusi tertentu juga sering dilekatkan dengan terorisme. Sebagai contoh Iran, Korea Utara dan Kuba selalu di cap oleh Amerika Serikat sebagai negara asal teroris. Di Indonesia, kota Solo dan Pondok Ngruki juga sering disebut dengan label tersebut.

Salah satu agen dari stigmatisasi adalah media massa. Media bisa mengutip sumber resmi seperti kepolisian atau juga memberikan nama tersendiri untuk sebuah peristiwa yang dianggap kegiatan terorisme. Istilah “sarang teroris”, “anak teroris”, “keluarga teroris” selalu memiliki konotasi negatif di masyarakat. Padahal tidak semua masyarakat di daerah tersebut adalah teroris. Anak dan keluarga mereka juga seringkali tidak tahu menahu terhadap kegiatan terorisme. namun mereka harus menanggung akibat di cap sebagai bagian dari terorisme.

Konsep lain yang juga menarik adalah proses *labelling*. Konsep Labelling berasal dari karya Lemert dan Becker 1963²². Menurut Lemert, banyak orang bertindak menyimpang dan isu yang penting adalah respon lingkungan sosial sekelilingnya terhadap tindakan tersebut. Kadang-kadang orang diberi cap menyimpang atau kriminal oleh sistem sosial. Sekali diberi cap, mereka berbuat sesuai harapan sosial dan terdorong bertindak dengan cara yang lebih menyimpang. Inilah yang menuntun pada proses *labelling* yang lebih kuat. Becker memperlihatkan bagaimana kelompok sosial menciptakan penyimpangan dengan membuat peraturan dan menentukan siapa yang terkena. Memberi cap "orang luar" bagi kehidupan sosial normal. Lahirnya Teori Penjulukan (*Labelling Theory*), diinspirasi oleh perspektif Interaksionisme Simbolik dari Herbert Mead dan telah berkembang sedemikian rupa dengan riset-riset dan pengujiannya dalam berbagai bidang seperti kriminologi, kesehatan mental (pengidap schyzophrenia) kesehatan dan pendidikan.

Media merupakan kekuatan yang menghadirkan kembali (merekpresentasikan) realitas sosial. Ini disebabkan karena media dalam memproduksi beritanya selalu diliputi oleh kompleksitas persoalan yang sedemikian rumit. Untuk memberikan penjelasan terhadap kompleksitas proses produksi pemberitaan pers, kita dapat menggunakan gagasan yang dikemukakan oleh Pamela Shoemaker dan Stephen D Reese. Pada prinsipnya Shoemaker dan Reese memang tidak membahas secara spesifik proses stigmatisasi dalam media

²² Diambil dari artikel Lemert, E. (2000). How we got where we are: An informal history of the study of deviance. In C. Lemert & M. Winter (Eds.), *Crime and deviance: Essays and innovations of Edwin M. Lemert* (pp. 66-74). Lanham: Rowman & Littlefield. Diambil dari artikel, "The Mark of Madness: Stigma, Serious Mental Illnesses, and Social Work" hasil penelitian Anna Scheyett, MSW, LCSW, CASWCM UNC –Chapel Hill Presentation developed by Maya Lindley, MSW

dan lebih banyak melakukan analisis terhadap berbagai dimensi serta kekuatan yang menentukan konstruksi²³.

Proses stigmatisasi dalam produksi berita dapat dijelaskan melalui mekanisme berikut. Sebuah berita, apalagi yang menyangkut kepentingan yang dianggap besar, seperti kekuasaan negara dan kehidupan publik yang luas selalu saja merupakan hasil kompromi. Selain itu, penulisan berita dan penyajian berbagai foto dan gambar sebagai ilustrasinya sudah tentu disesuaikan dengan sasaran pembacanya. Persoalan ini dapat dilacak pada tingkatan (*level*) yang bersifat makro sampai yang bertataran mikro. Jika dilakukan deskripsi secara lebih detail, maka berbagai hal yang berperan dalam proses produksi berita adalah:

Pertama, pada tingkatan ideologis menunjukkan bahwa dalam melakukan reportase dan memproduksi berita, jurnalis selalu dihadapkan pada berbagai nilai dominan (*dominant values*) yang sedang berlaku dalam kehidupan masyarakat.²⁴ Ideologi tidak lebih sebagai instrumen untuk melakukan penindasan terhadap kelompok minoritas. Kedua, pada tataran ekstra-media, menggambarkan bahwa isi media tidak ditentukan oleh para pengelola media itu sendiri. Terdapat banyak lembaga di luar media yang ikut mempengaruhinya, seperti pemerintah, pemasang iklan, sumber-sumber berita yang dianggap kredibel, serta kelompok-kelompok kepentingan yang lain. Bahkan organisasi media yang lain pun dapat menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan, sebab telah berkedudukan sebagai pesaing

²³ Lihat Pamela Shoemaker dan Stephen D. Reese, *Mediating the Message: Theories of Influences on Mass Media: 2nd edition* (New York: Longman, 1996).

²⁴ Croteau, David and Hoynes, William, 2000, *Media Society*, Second edition, California: Sage Publications (Croteau & Hoynes, 2000:162).

(*competitor*) dalam mekanisme pasar bebas.²⁵

Ketiga, pada tingkatan organisasional menunjukkan bahwa jurnalis yang melakukan reportase di lapangan secara langsung bukanlah satu-satunya figur yang membentuk sebuah berita. Organisasi media yang menjadi tempat kerjanya juga sangat menentukan sudut pandang (*angle*) berita yang telah ditulis. Dalam organisasi media memang telah terdapat struktur baku yang mengatur ritme kerja, kewenangan serta hierarki dari masing-masing bagian. Secara teknis hal ini disebut sebagai mekanisme internal yang terdapat dalam setiap lembaga media. Kebiasaan atau mekanisme ini lazim disebut sebagai proses penyaringan atau seleksi berita yang melewati sejumlah pintu redaksional (*gatekeeping*).

Keempat, pada tataran rutinitas media menunjukkan bahwa setiap lembaga media diandaikan memiliki karakteristik tersendiri dalam menentukan setiap jenis berita yang akan diturunkan. Proses tersebut secara umum diformulasikan dalam kerangka kerja yang mengarah pada upaya untuk memenuhi nilai berita (*news value*). Beberapa ukuran untuk menentukan kadar nilai berita dari suatu peristiwa adalah nilai penting dan kemenonjolannya (*importance/prominence*), sisi manusiawi (*human interest*), kontroversi, ketidaklaziman, aktualitas, serta kedekatan.²⁶ Ukuran-ukuran tersebut melekat pada kerja jurnalis sehingga nampak sebagai ukuran yang tidak dapat diganggu-gugat. Meski demikian sebenarnya ada mekanisme tersendiri yang diatur oleh pihak media untuk menetapkan ukuran-

²⁵ Lihat James Curran, Michael Gurevitch dan Janet Woollacott, "The Study of the Media: Theoretical Approaches", dalam Michael Gurevitch, Tony Bennett, James Curran, dan Janet Woollacott (eds.), *Culture, Society, and the Media* (London dan New York: Routledge, 1990), hal. 16-21.

²⁶ Shoemaker Pamela dan Stephen D. Reese, *Mediating the Message: Theories of Influences on Mass Media: 2nd edition* (New York: Longman, 1996). hal. 90-91.

ukuran tersebut. Sebagai contoh ukuran obyektifitas nilai berita yang menjadi acuan pemberitaan sebenarnya sangat subyektif sesuai dengan kepentingan masing-masing media.

Kelima, pada tingkatan individual. Tataran ini terdapat pada masing-masing jurnalis yang mencakup persoalan sikap, latar belakang pendidikan, pelatihan jurnalisme, dan ideologi sebagai sistem keyakinan (*belief sistem*). Setiap jurnalis mempunyai kepribadian (*personality*) dan sistem keyakinan yang spesifik dan tidak dapat disamakan antara satu jurnalis dengan jurnalis lainnya. Persoalan baik-buruk, benar-salah, penting-tidak penting dan ukuran sosial lainnya menjadi sangat relatif diantara individu jurnalis. Setiap jurnalis memiliki preferensi nilai pribadi dalam memandang suatu persoalan yang dihadapinya.

Dalam proses stigmatisasi pemberitaan terorisme proses ini berjalan secara simultan dalam rentang tarik-menarik kepentingan dan ideologis diantara berbagai kekuatan yang melingkupi media. Wacana terorisme yang dikembangkan media tidak lepas dari konteks sosial yang melingkupinya karena baik media sebagai institusi maupun jurnalis sebagai individu sesungguhnya menjadi bagian dari sistem sosial yang kompleks.

F. Metodologi Penelitian

• Paradigma Penelitian

Paradigma berfungsi mengorganisasi teori-teori dan penelitian yang lebih kecil. Menurut Guba dan Lincoln, paradigma berfungsi sebagai seperangkat keyakinan atau *basic belief systems* yang mengarahkan tindakan peneliti, berkaitan dengan prinsip-prinsip utama (pokok). Sebuah paradigma merepresentasikan

suatu cara pandang yang mendefinisikan sifat 'dunia', tempat atau posisi individu di dalamnya dan jarak kemungkinan hubungan antara 'dunia' dengan bagian-bagiannya. Paradigma ini didasarkan pada asumsi *ontology*, *epistemology*, dan *methodology*, dapat ditunjukkan sebagai satu set *basic beliefs* (metafisik), yang berkaitan dengan prinsip-prinsip utama (pokok)²⁷.

Terkait dengan penelitian ini, maka paradigma yang digunakan adalah paradigma kritis, dimana dalam memahami realitas sosial, perspektif kritis melihat realitas dengan cara yang berbeda. Realitas diciptakan bukan oleh alam (*nature*), tetapi oleh orang (*people*). Ini berarti orang-orang mempunyai kekuasaan dalam memanipulasi, mengkondisikan, dan melakukan *brain washing* terhadap orang lain untuk memahami sesuatu dan menginterpretasikan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Dalam studi penelitian isi media, pandangan kritis melihat bahwa media bukanlah saluran yang bebas dan netral melainkan ditunggangi oleh kelompok tertentu dan digunakan untuk mendominasi kelompok yang tidak dominan. Oleh sebab itu, media dipenuhi oleh prasangka, retorika, dan bahkan propaganda²⁸

Paradigma Kritis menentang epistemologi kritik Marxisme sebagai bagian dari keseluruhan metodologi penelitiannya. Asumsi realitas Paradigma Kritis adalah keyakinan bahwa realitas tidaklah netral, namun dipengaruhi dan terikat oleh nilai serta kekuatan ekonomi, politik, dan sosial. Maka dari itu, tujuan utama Paradigma Kritis adalah pembebasan nilai dari dominasi kelompok penindas. Hal ini akan mempengaruhi cara paradigma kritis membedah realitas

²⁷ Denzin, Norman K dan Yvonna S. Lincoln (2005), *Handbook of Qualitative Research*, London: Sage Publication.(hal:99-105).

²⁸ Eriyanto, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media* (Yogyakarta: LKiS,2003)

dalam penelitian ilmiah, termasuk di dalamnya analisis kritis tentang teks media. Penelitian yang mengetengahkan paradigma kritis juga mengutamakan analisis yang menyeluruh, kontekstual, dan *multi level*. Sehingga, dapat dikatakan bahwa penelitian dengan paradigma kritis menekankan pada *historical situatedness* dalam seluruh kejadian sosial yang ada²⁹.

Pada jenjang aksiologis, Paradigma Kritis ditandai tiga hal, yaitu nilai, etika, dan pilihan moral sebagai bagian yang saling terkait. Dalam hal ini peneliti menempatkan diri sebagai transformatif intelektual, advokasi, dan aktivis agar dapat menemukan nilai-nilai yang telah dimediasikan³⁰.

Paradigma Kritis beranggapan bahwa isi media bukanlah sesuatu yang netral dan menjadi ruang dari berbagai pandangan yang berseberangan dalam masyarakat. Sebaliknya, media adalah ruang di mana kelompok dominan menyebarkan pengaruhnya dengan meminggirkan kelompok lain yang tidak dominan. Media dipandang sebagai instrumen ideologi yang mengkonstruksi realitas atas penafsiran dan definisinya sendiri untuk disebarakan kepada khalayak. Representasi oleh media dalam struktur masyarakat dipahami sebagai media yang mampu memberikan konteks pengaruh kesadaran. Dengan demikian media menyediakan pengaruh guna mereproduksi dan mendefinisikan status atau memapankan keabsahan struktur tertentu.

²⁹ Denzin, Norman K dan Yvonna S. Lincoln (2005), *Handbook of Qualitative Research*, London: Sage Publication.(hal:170). Paradigma lain yang juga sering digunakan dalam penelitian adalah paradigma positivis yang mengedepankan ukuran obyektifitas, verifikatif. Meyakini adanya realitas obyektif yang bisa ditangani.

³⁰ Lihat Norman Fairclough, *Media Discourse* (Auckland: Edward Arnold, 1995), hal. 59

- **Metode Penelitian**

- Analisis Wacana (*Discourse Analysis*)**

Dalam proses komunikasi massa terdapat tiga komponen utama yaitu pengirim, pesan dan penerima. Pesan yang dikirim oleh institusi media lahir dari proses seleksi berjenjang sampai menjadi berita yang terpilih untuk ditampilkan di halaman media. Dalam proses produksi ini institusi media tidak dapat mengesampingkan keberadaan lembaga-lembaga sosial dan politik lain yang berada di luarnya, seperti pemerintah, masyarakat yang menjadi pangsa pasar sasarannya, serta kekuatan pemilik modal yang kemungkinan besar melakukan intervensi. Selain pengaruh dari luar insitusi media, dalam proses produksi pesan juga melewati seleksi dan pertarungan internal di dalam institusi media sehingga menghasilkan kompromi di antara mereka. Di sisi lain penerima pesan juga memiliki kemampuan untuk memilih dan menafsirkan pesan yang dikirim oleh media sesuai dengan kepentingan mereka sendiri.

Penelitian ini menentengahkan metode Analisis Wacana, dimana wacana dipandang sebagai praktik sosial yang berhubungan secara dialektis dengan identitas dan relasi sosial³¹. Analisis wacana yang diketengahkan dalam penelitian ini merupakan metode yang menciptakan hubungan dialektikal antara objek kajian dengan *nature* lingkungan sekitar, tempat wacana itu tumbuh, mengalami perubahan dan menjadi bagian dari lingkungan itu sendiri. Wacana sekaligus

³¹ Eriyanto, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media* (Yogyakarta: LKiS,2001). Van Dijk mengungkapkan bahwa analisis wacana melanjutkan tradisi penelitian yang menolak “value free”, ilmu pengetahuan khususnya pemikiran akademis tidak lepas dari pengaruh struktur social dan diproduksi pada inteaksi social, baca selengkapnya tulisan Tun Van Dijk “Critical Discourse Analysis”, dalam artikel yang tulisan tersebut bisa diambil di <http://mediadiscourses/org>, web site yang memuat tulisan-tulisan ilmuan Belanda ini.

berfungsi sebagai *medium* yang memaparkan identitas (karakter penentu) dari bagian-bagian yang ditelitinya yang dapat membentuk relasi-relasi tertentu dalam lingkungan sosial tersebut. Wacana juga melekat dalam situasi, institusi, dan kelas sosial tertentu. Dengan demikian pemaknaan wacana dapat menjelaskan bagaimana wacana memproduksi dan mereproduksi *status quo* serta mentransformasikannya.

Analisis Wacana merupakan salah satu metode kualitatif yang dapat digunakan untuk melakukan analisis terhadap teks secara lebih intensif, karena mampu mengungkap makna-makna tersembunyi (*hidden meaning*) yang bersifat laten, adalah analisis wacana (*discourse analysis*). Analisis Wacana mencoba untuk membahas teks dalam level yang lebih luas. Sedangkan Analisis Wacana terhadap teks-teks tertulis memiliki tujuan untuk mengeksplisitkan norma-norma dan aturan-aturan yang bersifat implisit yang terdapat dalam produksi bahasa. Ini disebabkan adanya pemahaman bahwa dalam wacana itu sendiri terdapat berbagai rangkaian dari unit-unit yang bersifat hierarkis yang membentuk struktur diskursif.³²

Metode Analisis Wacana yang diketengahkan dalam penelitian ini adalah metode analisis wacana dikemukakan oleh Teun A. van Dijk, yang dilakukan dengan menghubungkan tiga dimensi, yaitu teks, kognisi sosial, dan konteks/analisis sosial. Analisis dalam pemaknaan tanda dalam level naskah menaruh perhatian pada bagaimana makna diciptakan dan disampaikan melalui

³²Penulis mengutip pendapat Sara Mills, dalam *Discourse* (London and New York: Routledge, 1997), hal. 135. Tulisan tersebut dikutip Eriyanto dalam *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media* (Yogyakarta: LKiS, 2001) hal: 199-201

teks dan khususnya melalui narasi (cerita).³³ Analisis pada jenjang kognisi sosial diperlukan untuk membongkar makna tersembunyi teks, karena setiap teks pada dasarnya dihasilkan lewat kesadaran, pengetahuan, prasangka, atau pengetahuan tertentu atas suatu peristiwa³⁴.

Pada jenjang konteks sosial, analisis mengaitkan penelitian dengan konteks sosial budaya yang ada dalam masyarakat. Dua hal yang diperhatikan dalam konteks sosial menurut van Dijk adalah kekuasaan (*power*) dan akses (*access*). Teun van Dijk mendefinisikan kekuasaan (*power*) sebagai kepemilikan yang dimiliki oleh suatu kelompok (atau anggotanya), satu kelompok untuk mengontrol kelompok (atau anggota) dari kelompok lain. Akses berkaitan dengan kesempatan yang diberikan bagi kelompok untuk masuk dalam medan wacana. Analisis wacana memberikan perhatian yang besar pada apa yang disebut sebagai dominasi, dimana dominasi direproduksi dengan cara memberikan akses khusus pada suatu kelompok dibandingkan kelompok lain (diskriminasi)³⁵.

- **Kualitas Penelitian**

Untuk mengukur kualitas penelitian ini diperlukan ukuran yang mampu menunjukkan bahwa penelitian memenuhi kriteria kualitas yang ditentukan. Kriteria kualitas (*Goodness criteria*) penelitian dapat dicermati dari paradigma/perspektif yang digunakan oleh peneliti. Kriteria kualitas penelitian

³³ Berger, Arthur Asa, *Media Analysis Techniques: Revised Edition* (New Delhi: Sage Publications, 2000). Hal:14

³⁴ Eriyanto, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media* (Yogyakarta: LKiS,2001) hal:261. Dalam buku tersebut juga dibahas beberapa model metodologi penelitian wacana lainnya dari Roger Fowler, Robert Hodge, Gunther kres, dan Tony Trew. Model lain dikemukakan oleh Theo Van Leeuwen, Sar Mills, dan Norman Fairclough

³⁵ Baca selengkapnya tulisan Tun Van Dijk, “ Power and The News Media ” versi pdf bisa diakses di <http://daneprairie.com>

kualitatif didasarkan pada sifat keaslian (*authenticity*) penelitian dan dapat dipercaya (*trustworthiness*).

Berdasar pada pemikiran tersebut, maka kriteria tentang kualitas penelitian ini ditunjukkan pada ketersediaan data yang memenuhi aspek *authenticity* dan dapat dipercaya (*trustworthiness*)³⁶. Dalam studi ini *Critical Discourse Analysis* model Teun Van Dijk (*Analisis Texts, Social Cognition, dan Analisis Social Context*) dapat dijadikan sebagai metode yang sesuai untuk mendeskripsikan Stigmatisasi Pemberitaan Terorisme di Surat Kabar Harian Kompas.

Pada Analisis *Social Cognition* dan *Social Context*, dua analisis tersebut dapat mengkritisi pengalaman dan pikiran para jurnalis tentang proses produksi berita terorisme. Kognisi sosial dari jurnalis digali melalui kegiatan wawancara mendalam dan pengamatan tentang aktifitas kerja jurnalis dalam proses peliputan, penulisan, dan publikasi berita. Penulis memperoleh data primer dengan melakukan wawancara langsung kepada jurnalis Kompas yang meliput berita terorisme. Kegiatan wawancara dilakukan untuk memperoleh gambaran kognisi sosial dari jurnalis ketika melakukan peliputan dan penulisan berita terorisme. Data yang diperoleh dari wawancara menjadi data primer yang memenuhi aspek *authenticity*. Pemilihan narasumber wawancara dari jurnalis yang terlibat langsung dalam produksi berita merupakan bagian dari memenuhi unsur

³⁶ Guba dan Lincoln dalam Denzin dan Lincoln, 1994: 112&116). Menurut Thomas A. Schwandt, *authenticity* diperoleh bila peneliti dapat melakukan identifikasi empati (*emphatic identification*), yaitu suatu tindakan ilmiah untuk mengingat dan menghidupkan kembali secara psikologis pengalaman/pikiran subjek penelitian guna memahami motif, keyakinan, keinginan dan pemikirannya subjek tersebut. *Trustworthiness* ditunjukkan dengan ketersediaan data yang diperoleh peneliti dari sumber yang relevan dengan penelitian. (Schwandt dalam Denzin dan Lincoln, 1994: 118)

trustworthiness. Peneliti memilih wartawan Kompas yang terlibat langsung dalam produksi berita terorisme sehingga data yang diperoleh dapat dipercaya.

- **Sumber Data**

Sejumlah sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pemberitaan media Kompas³⁷ selama bulan Juli-Oktober 2009 yang terkait terorisme. Alasan pemilihan periode tersebut karena bertepatan dengan pemberitaan pengeboman Hotel JW Marriot dan Ritz Carlton dimana media memberikan perhatian besar dibanding peristiwa lainnya. Peneliti memilih Kompas karena media ini dikenal sebagai media yang obyektif sehingga perlu diteliti apakah Kompas juga melakukan stigmatisasi dalam pemberitaan. Media tersebut juga dibaca oleh jutaan orang di Indonesia sehingga pemberitaannya berpotensi untuk mempengaruhi wacana di masyarakat.

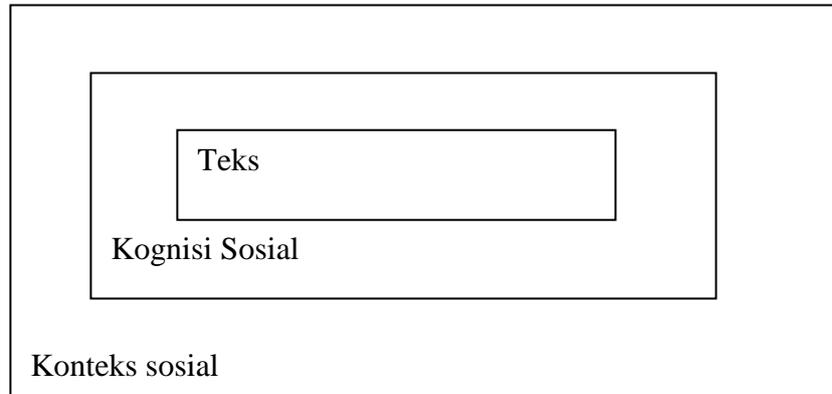
- **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam melakukan pengumpulan data, peneliti akan melakukan pemilihan (seleksi) terhadap tema-tema pemberitaan yang ada dalam periode tersebut dan hanya melakukan analisa terhadap berita yang berkaitan dengan terorisme. Dalam harian Kompas pemberitaan tentang terorisme banyak di muat selama periode Juli-Oktober 2009. Berita-berita tersebut dikemas dalam bentuk berita utama (headline news), feature, dan berita singkat yang mengungkap kejadian seputar terorisme.

³⁷ Kompas dimiliki oleh kelompok Gramedia Group yang selama ini dikenal sebagai media yang netral dan obyektif. Secara emosional Kompas sering dilekatkan dengan kelompok Kristen sehingga dianggap mewakili kepentingan mereka. Wacana terorisme cukup lekat dengan kelompok muslim sehingga menarik untuk dicermati wacana yang dikembangkan media ini.

- **Teknik Analisis Data**

Model analisis wacana yang dikemukakan Van Dijk dapat digambarkan sebagai berikut³⁸:



Gambar I. 1. Model Analisis Wacana

Analisis Teks

Van Dijk mengungkapkan beberapa elemen yang dapat digunakan untuk menganalisa teks. Elemen-elemen tersebut adalah³⁹:

- **Tematik**

Elemen ini merujuk pada gambaran umum dari suatu teks. Disebut juga sebagai gagasan inti, ringkasan atau bagian utama dari suatu teks.

Tema menunjukkan konsep dominan, sentral, dan bagian terpenting dari isi berita.

³⁸ Gambar diambil dari buku Eriyanto, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media* (Yogyakarta: LKiS,2001) hal: 225

³⁹ Uraian lengkap Van Dijk bisa dibaca di tulisan Van Dijk berjudul "Opinion And Ideologies In The Press" pada sub bab "Discourse Structure", dimuat dalam "Approach to Media Discourse", Allan Bell dan Peter Garet (ed) hal 31-63. Untuk melengkapi penjelasan tersebut penulis juga mengutip dari Eriyanto, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media* (Yogyakarta: LKiS,2001) hal 221-259.

- Skematik

Skema atau alur dari suatu teks menunjukkan bagaimana bagian-bagian tersusun dan diurutkan sehingga membentuk kesatuan arti.

- Latar

Latar merupakan bagian berita yang dapat mempengaruhi arti yang ingin ditampilkan. Seorang jurnalis biasanya mengemukakan latar belakang dari peristiwa yang ditulisnya untuk menggiring pandangan khalayak.

- Detil

Elemen ini berhubungan dengan kontrol informasi yang ditampilkan seseorang. Komunikator akan menampilkan secara berlebihan informasi yang menguntungkan dirinya atau membentuk citra yang baik. Elemen detil merupakan strategi wartawan untuk mengekspresikan sikap dirinya secara implisit.

- Maksud

Dalam maksud elemen yang menguntungkan komunikator akan ditampilkan secara eksplisit dan jelas. Sebaliknya informasi yang tidak menguntungkan akan ditampilkan tersamar, implisit dan tidak jelas.

- Koherensi

Koherensi adalah pertalian antar kata atau kalimat dalam teks. Kalimat yang mengungkapkan fakta berbeda akan dihubungkan sehingga nampak koheren. Fakta yang sama sekali tidak berhubungan bisa

nampak serasi ketika dihubungkan oleh wartawan. Jenis koherensi yang sering digunakan adalah koherensi kondisional dan koherensi pembeda. Keduanya digunakan untuk memperjelas kalimat atau bisa membuat kaburnya suatu fakta. Koherensi kondisional ditandai dengan anak kalimat sebagai penjelas. Koherensi pembeda diawali dengan pertanyaan bagaimana dua peristiwa atau fakta hendak dibedakan. Dua fakta bisa dibuat seolah bertentangan satu sama lain dengan teknik ini.

- Peningkaran

Peningkaran menggambarkan bagaimana wartawan menyembunyikan sikapnya melalui pilihan kata dan kalimat. Dia menyusun fakta seolah menyetujui sesuatu padahal tidak sama sekali. Kata yang sering digunakan adalah "tetapi" yang mengungkapkan peningkaran terhadap persetujuan atau penolakan sesuatu.

- Bentuk kalimat

Bentuk kalimat berkaitan dengan sintaksis yang berhubungan dengan kerangka berfikir logis yaitu prinsip-prinsip kausalitas. Bentuk kalimat aktif dan pasif memiliki perbedaan kerangka berfikir yang menunjukkan bagaimana fakta disusun.

- Kata ganti

Kata ganti digunakan untuk memanipulasi bahasa dengan menciptakan suatu komunitas imajinatif. Kata ganti digunakan untuk menunjukkan posisi seseorang dalam wacana. Kata ganti seperti "saya" dan "kami" menunjukkan posisi yang berbeda dari seseorang.

- Leksikon

Elemen ini menandakan bagaimana seseorang melakukan pemilihan kata atas berbagai kemungkinan kata yang tersedia.

- Praanggapan

Elemen ini merupakan pernyataan yang digunakan untuk mendukung makna suatu teks. Praanggapan merupakan upaya mendukung suatu pendapat dengan memberikan premis yang dipercaya kebenarannya.

- Grafis

Grafis merupakan bagian yang untuk memeriksa apa yang ditekankan melalui pemberian karakteristik khusus terhadap kata seperti dicetak tebal, miring, diberi garis bawah, tanda petik, dan gambar agar memperoleh perhatian khusus.

- Metafora

Pesan pokok suatu berita tidak hanya ditampilkan dalam kalimat secara lugas melainkan juga bisa menggunakan metafora, kiasan, atau bumbu lain yang membuat suatu fakta lebih menarik.

Analisis Kognisi Sosial

Untuk analisis kognisi sosial, penulis akan mengetengahkan data yang diperoleh dari rujukan yang dikemukakan oleh pihak pemproduksi, pemerhati, maupun audiens yang dimuat oleh suatu media. Penulis akan melakukan wawancara mendalam dengan jurnalis yang terlibat dalam proses produksi berita.

Hal ini diperlukan untuk mengetahui bagaimana kepercayaan, pengetahuan dan prasangka yang dimiliki oleh sang wartawan terlibat dalam proses pembuatan berita. Selain itu bagaimana kepercayaan individual tersebut melebur dalam kebijakan media yang menaunginya sehingga menghasilkan formula tertentu dalam produksi berita.

Analisis Konteks Sosial

Dalam analisis konteks sosial penulis akan mengamati dinamika masyarakat Indonesia yang multietnis dan agama, terutama menyoroti masalah dinamika hubungan antar agama dan stereotip terhadap kelompok tertentu dalam kasus terorisme. Wacana terorisme akan dianalisis dengan rujukan literatur dan studi pustaka yang ada di masyarakat.

Berikut gambaran skema analisa dan metode yang digunakan⁴⁰:

Struktur	Metode
<p>Teks</p> <p>Menganalisa bagaimana strategi wacana yang dipakai untuk menggambarkan seseorang atau peristiwa tertentu, bagaimana strategi tekstual yang dipakai untuk menyingkirkan atau memarjinalkan suatu kelompok, gagasan, atau peristiwa</p>	<p>Critical linguistic</p>

⁴⁰Table dikutip dari Eriyanto, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media* (Yogyakarta: LKiS,2001) hal: 275. Uraian tersebut didasari tulisan Van Dijk berjudul "Opinion And Ideologies In The Press" pada sub bab "Discourse Structure", dimuat dalam "Approach to Media Discourse", Allan Bell dan Peter Garet (ed)hal 21-63

tertentu	
Kognisi sosial Menganalisa bagaimana kognisi wartawan dalam memahami seseorang atau peristiwa tertentu yang akan ditulis	Wawancara mendalam
Analisis konteks sosial Menganalisa bagaimana wacana yang berkembang dalam masyarakat, proses produksi dan reproduksi seseorang atau peristiwa digambarkan	Studi pustaka, penelusuran sejarah

Tabel I.1 Skema analisa dan metoda analisis wacana

G. Kelemahan Penelitian

1. Kelemahan Teoritis

Analisis Wacana pada dasarnya ingin memperlihatkan bagaimana pertarungan-pertarungan kekuasaan yang ada dalam masyarakat, namun sekaligus juga ingin menggambarkan bagaimana dominasi dan hegemoni antara kelompok yang dominan dan kelompok yang didominasi dalam masyarakat. Peneliti berhadapan dengan keterbatasan data dengan unit penelitian berupa teks yang mengandalkan sumber data sekunder berupa literatur dan *media reviews*. Karena itu kajian yang dilakukan tidak mampu mengeksplorasi lebih banyak wacana yang dikembangkan dalam stigmatisasi pemberitaan teorisme di Indonesia.

2. Kelemahan Kontekstual

Penggambaran media tentang suatu kelompok yang mengandung *stigma* terbentuk pada dimensi kognitif, dan afektif, sementara *discrimination* yang muncul tidak serta merta berasal dari pemberitaan semata. Media di Indonesia mengacu pada media Barat dalam mendefinisikan terorisme mengingat wacana ini telah menjadi wacana global. Mengingat penulis melakukan analisis pada media *mainstream* di Indonesia, maka temuan penelitian bisa jadi tidak berhubungan secara langsung dengan kognisi sosial dan konteks sosial masyarakat Indonesia yang tidak tercermin dalam pemberitaan media *mainstream*. Artinya penelitian yang dilakukan terbatas pada kognisi dan konteks sosial yang menjadi *ruling class* semata dan mengabaikan *marginal class*